

Manajemen Strategik Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Dalam Meningkatkan Pendapatan Retribusi Parkir

Rahmad Rahmad¹, Nasfi Nasfi^{2*}

¹Program Studi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim, Bukittinggi

^{2*}Program Studi Perbankan Syariah, STES Manna Wa Salwa, Padang Panjang

Email: ¹rafa.dafa2013@gmail.com, ^{2*}nasfi.anwar@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the factors that influence the increase in local revenue (PAD) of the City of Bukittinggi from parking fees, how to manage strategies in increasing parking fees. The study consisted of 2 stages, the Delphi method with 2 stages of interviews and SWOT analysis, to obtain information on the factors that influence the increase in parking fees and see the level of importance and effectiveness of the government's response. Informants are experts (experts) as many as 6 people and conduct a SWOT analysis to determine the right strategy. The research findings, the factors that influence the increase in parking fees, are seen from Strengths with an average score of 4.83 or 96.67 and the commitment of regional heads and ranks with an average score of 4.83 or 96.67. The level of effectiveness of the government's response is cooperation with other agencies with an average score of 3.83 or 76.67. Weaknesses factor average score of 5.00 or 100 The level of effectiveness of the government's response to parking attendants and supervisors who violate the rules with an average score of 4.17 is less effective. Opportunity factor with an average score of 5.00 or 100. The level of effectiveness of the government's response is the advancement of information technology with an average score of 4.17. Threats with the highest level of importance were thuggery and unscrupulous officers with an average score of 4.83. Based on the level of effectiveness of the government's response is natural conditions (pandemic) with an average score of 4.17 or 83.33 with Effective criteria.

Keywords: Strategic Management, Local Revenue, Parking Fees, Delphi Method, SWOT Analysis

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi dari retribusi parkir, bagaimana manajemen strategi dalam meningkatkan retribusi parkir. Penelitian terdiri 2 tahap, metode Delphi dengan 2 tahapan wawancara dan analisis SWOT, untuk mendapatkan informasi faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan retribusi parkir dan melihat tingkat kepentingan dan tingkat efektifitas respon pemerintah. Informan adalah expert (tenaga ahli) sebanyak 6 orang dan melakukan analisis SWOT untuk menentukan strategi yang tepat. Temuan penelitian, faktor yang mempengaruhi peningkatan retribusi parkir, dilihat dari strengths dengan skore rata-rata 4,83 atau 96,67 dan komitmen kepala daerah

dan jajaran dengan skore rata-rata 4,83 atau 96,67. Tingkat efektifitas respon pemerintah adalah kerjasama dengan instansi lain dengan skore rata-rata 3,83 atau 76,67. Faktor weaknesses skore rata-rata 5,00 atau 100 Tingkat efektifitas respon pemerintah terhadap juru parkir dan pengawas yang melanggar aturan dengan skore rata-rata 4,17 kurang efektif. Faktor opportunities dengan skore rata-rata 5,00 atau 100. Tingkat efektifitas respon pemerintah adalah kemajuan teknologi informasi dengan skore rata-rata 4,17. Threats tingkat kepentingan tertinggi adalah premanisme dan oknum aparat dengan skore rata-rata 4,83. Berdasarkan tingkat efektifitas respon pemerintah adalah kondisi alam (pandemi) dengan skore rata rata 4,17 atau 83,33 dengan kriteria Efektif .

Kata Kunci: *Manajemen Strategi, Pendapatan Daerah, Retribusi Parkir, Metode Delphi, Analisis SWOT.*

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menyebabkan terjadinya perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dikenal dengan otonomi daerah (Asnah. A, Eka. F, Sabri. S, Nasfi, 2021). Pada masa otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, sesuai dengan motivasi dan kinerja seorang aparatur negara. Selain itu, otonomi daerah bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menciptakan persaingan yang sehat antar daerah serta mendorong timbulnya kreasi dan inovasi (Sabri & Nasfi, 2020). Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan untuk dapat lebih mampu mengelola sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya kontribusi penerimaan PAD terhadap APBD mencerminkan kemampuan manajerial pemerintah daerah dalam mengelola berbagai sumber penerimaan daerah, sekaligus mencerminkan potensi perekonomian daerah. Namun, kenyataannya banyak daerah yang belum menggali potensi daerahnya secara optimal dan masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut terjadi karena banyak daerah yang tidak menyadari potensi sektor-sektor PAD yang ada, dan tidak menjadikan daerahnya sebagai daerah potensial sumber PAD. Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, Laba BUMD dan lain-lain PAD yang sah. PAD juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang sebelumnya kurang mendapat perhatian, hal ini disebabkan oleh ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dimana sumber dana pembangunan daerah sebagian besar diperoleh dari pemerintah pusat (Nurhayati, 2015).

Kota Bukittinggi memiliki banyak potensi yang bisa dijadikan peluang untuk meningkatkan penerimaan daerah. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Bukittinggi berusaha untuk meningkatkan Penerimaan Daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Salah satu penerimaan daerah kota Bukittinggi bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijelaskan dalam UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah Pasal 1 angka 18. Menurut Nasfi (2020) Pendapatan Asli Daerah

merupakan penerimaan daerah dan wilayahnya sendiri yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing daerah akan berdampak pada kemandirian daerah tersebut. Kemandirian pendanaan daerah, dapat dilihat dari kontribusi PAD terhadap komponen pendapatan daerah secara keseluruhan (Lutfi & Prawira, 2020).

PAD Kota Bukittinggi terhadap Pendapatan Daerah secara rata-rata masih menunjukkan angka yang rendah yaitu sebesar 11,60 persen. Sementara pemberi kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan daerah yaitu berasal dari Pendapatan Dana Perimbangan dengan rata-rata mencapai 77,10 persen, hal ini terlihat bahwa ketergantungan Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap Pemerintah Pusat masih sangat tinggi. Dari tahun ke tahun tingkat kemandirian Pemerintah Kota Bukittinggi terus mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan kecenderungan peningkatan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sektor perhubungan, jenis-jenis pelaksanaan retribusi yang diusahakan dan dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, adalah Retribusi Parkir ditepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum.

Tetapi dalam pelaksanaan retribusi parkir terdapat beberapa kendala antara lain : terdapat beberapa titik parkir penetapan target retribusi parkir melebihi perkiraan potensi yang ada, pada jam jam tertentu terjadi perebutan lokasi parkir oleh pihak pihak tertentu. Pemungutan retribusi yang merupakan kewenangan dari Dinas Perhubungan, maka berdasarkan survei yang dilakukan permasalahan yang harus segera diselesaikan adalah retribusi perparkiran karena jenis retribusi ini yang memiliki tingkat realisasi yang selalu tidak memenuhi target PAD yang ditetapkan oleh pemerintah kota Bukittinggi.

2. KAJIAN TEORI

Manajemen Strategik

Manajemen strategik dapat di definisikan sebagai sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya (Nasfi et al., 2022). Dari definisi tersebut dinyatakan. bahwa manajemen strategis berfokus pada usaha untuk mengintegrasikan manajemen, pemasaran, keuangan/akutansi, produksi/operasi, penelitian dan pengembangan, serta system informasi computer untuk mencapai keberhasilan organisasional. Tujuan manajemen strategi adalah untuk mengeksplorasi serta menciptakan berbagai peluang baru dan berbeda untuk esok (Shavab et al., 2021).

Para pakar manajemen memiliki definisi manajemen strategis masing-masing. Dari buku *Strategic Management* karya Nicholas S. Majluk dan Arnoldo C. Hax, manajemen strategis bisa dimaknai sebagai cara memandu perusahaan untuk mencapai sejumlah sasaran. Mulai dari nilai & tanggung jawab korporasi, kapabilitas manajerial, hingga sistem administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis dan operasional di berbagai tingkat hierarki (Astuti, 2022).

Intinya, manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar buatan manajemen tertinggi yang diaplikasikan oleh semua anggota suatu organisasi demi terwujudnya tujuan organisasi. Manajemen puncak, tingkatan manajemen lainnya, dan bagian operasional memiliki peran masing-masing dalam menjalankan manajemen strategis. Semua komponen dalam perusahaan harus berpartisipasi dalam menyusun, menjalankan, dan mengontrol keputusan yang telah disepakati. Hasilnya tujuan bersama pun tercapai (Hikmatullah, 2021).

Menurut Larasati (2020), aspek-aspek manajemen strategi antara lain pengungkapan visi dan misi badan usaha, penentuan melaksanakan strategi, serta menilai kinerja dan

melaksanakan penyesuaian-penyesuaian serta tindakan korektif tujuan-tujuan, menciptakan strategi, mengimplementasikan dan melaksanakan strategi, serta menilai kinerja dan melaksanakan penyesuaian-penyesuaian serta tindakan korektif (Larasati & Meirinawati, 2020). Sedangkan menurut Muslimin (2018) secara umum, manajemen strategi memiliki aspek-aspek strategi yang senantiasa dipertimbangkan dalam menentukan strategi yang akan dilaksanakan. Aspek-aspek tersebut antara lain (Muslimin, 2018):

1. Mengembangkan visi dan misi organisasi
2. Mengatur tujuan organisasi
3. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan
4. Mengimplementasikan dan melaksanakan strategi
5. Mengevaluasi hasil, memonitor perkembangan baru, dan membuat perbaikan dan penyesuaian strategi.

Selanjutnya menurut Hendrayani (2021) menjelaskan, aspek manajemen strategi terdiri dari (Hendrayani & Triyasa, 2021) :

- a) Menentukan misi organisasi
- b) Menentukan tujuan organisasi
- c) Menentukan strategi Intent (visi)
 - 1) Strech: menciptakan aspirasi dan ambisi, yang dalam keadaan normal tidak mungkin.
 - 2) Foresight: prediksi masa depan dengan mempertimbangkan kecenderungan teknologi, perilaku konsumen, lingkungan, dan sebagainya.
 - 3) Leverage: bagaimana menciptakan pengaruh yang lebih besar dengan sumber daya yang dimiliki saat ini.

Hunger, David dan Platak dalam Pricilla (2020), proses manajemen strategi terdiri dari beberapa bagian, yaitu: misi, tujuan organisasi, strategi organisasi, lingkungan, strategi dan kebijakan fungsional, program, anggaran, dan prosedur kerja, evaluasi dan pengendalian (Pricilla, 2020).

Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari tiga kelompok yaitu ; 1) PAD yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan di pungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2) Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (Nasfi et al., 2021).

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa PAD, adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Nugroho (2000) Agar Pemerintahan daerah mempunyai urusan rumah tangganya sendiri, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pendapatan daerahnya melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta PAD yang berasal dari pajak, retribusi, dan lain-lain. PAD terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti laba, dividen dan penjualan saham milik daerah serta pinjaman dan PAD yang sah seperti hasil penjualan aset tetap dan jasa giro (Widjaja 2007). PAD menurut Undang-undang No 33 Tahun 2004

Tentang Perimbangan Kekuasaan Antara Pusat Dan Pemerintahan Daerah Pasal 6 Ayat (1) PAD bersumber dari: Pajak Daerah, Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah (Endri et al., 2021).

Sumber-sumber PAD adalah :

1. Pajak Daerah

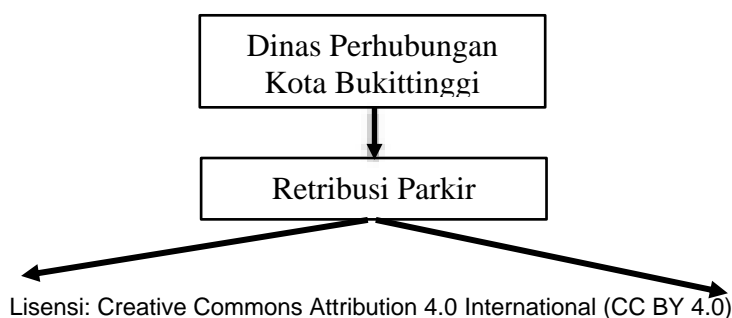
Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

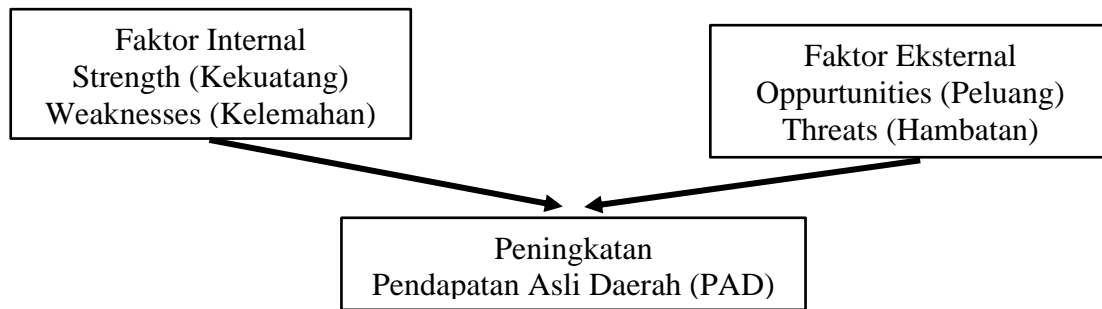
2. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan oleh pejabat retribusi kepada Wajib Retribusi yang bersifat memaksa dengan teganprestatie secara langsung dan dapat dipaksakan penagihannya. Sarana hukum yang digunakan untuk memaksakan penagihan retribusi tidak berbeda dengan pajak, berupa sanksi administrasi maupun sanksi kepidanaan (Liswatin, 2022). Retribusi dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian dari “pungutan yang bersifat memaksa” yang dibutuhkan oleh Negara karena itu diatur dengan undang-undang (Ariyanti, 2019). Ahmad (2021). menyatakan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Ahmad, 2021).

Kerangka Konseptual

Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi merupakan salah satu instansi yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk Retribusi Parkir. Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Banyak hambatan baik internal maupun eksternal dalam penerimaan pajak dan Retribusi Parkir sehingga diperlukan analisa SWOT untuk mencari strategi yang cocok untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dengan membandingkan Strength (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (Peluang) dan Threats (Hambatan). Mendasari hal itu maka dapat di susun suatu model gambar kerangka berfikir dalam penelitian ini, yaitu:





Gambar 1. Kerangka Konseptual

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini mengkaji secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan. Pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan sesuai fakta di lapangan, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelasan, bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya dan dideskripsikan dalam bentuk narasi. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan Memusatkan pada pemecahan masalah yang tepat mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam mencari Strategi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dalam meningkatkan Retribusi Daerah

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Agar dalam penelitian ini dapat di peroleh data-data yang relevan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder.

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik Pengumpulan Data Primer adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang menjadi sumber penelitian di lapangan. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara Metode Wawancara dibantu dengan kuesioner. Menurut Koentjaraningrat, metode wawancara atau interview adalah untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Teknik Delphi dan teknik analisis SWOT.

1) Teknik Delphi

Metode Delphi secara definisi adalah proses dalam kelompok yang melibatkan interaksi antara peneliti dan sekelompok ahli terkait topik tertentu; biasanya melalui bantuan kuesioner. Metode ini digunakan untuk mendapatkan konsensus mengenai proyeksi/tren masa depan menggunakan proses pengumpulan informasi yang sistematis. Metode ini berguna pada saat pendapat dan penilaian dari para ahli dan praktisi dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah

Teknik Delphi atau Expert Judgement (pertimbangan ahli) adalah suatu cara pendekatan yang bersifat intuitif untuk mengorganisasikan ide-ide atau pemikiran diantara para pakar, para ahli untuk membahas (mengatasi masalah) lembaga atau masyarakat pada masa yang akan datang (Winarso, 2020).

2) Analisis SWOT

Analisis SWOT yang terdiri dari Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats terkait dengan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dalam meningkatkan Retribusi Daerah. Analisis ini didasarkan logika yang dapat memaksimalkan strength (kekuatan) dan opportunity (peluang), namun secara bersamaan dapat meminimalkan weakness (kelemahan) dan threat (ancaman). Strength (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunity (peluang) dan threat (ancaman) merupakan faktor-faktor strategis yang perlu dianalisis dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut pula analisis situasi dengan model analisis SWOT. Analisis SWOT ini akan dilakukan untuk mencari Strategi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dalam meningkatkan Retribusi Daerah, hal ini disebut pula analisis situasi dengan model analisis SWOT.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Metode Delphi

Wawancara tahap pertama

Wawancara tahap pertama untuk menentukan faktor faktor yang mempengaruhi peningkatan Retribusi Parkir, faktor Strengths (Kekuatan) adalah Jumlah titik parkir masih memadai, Prosedur penyetoran retribusi sudah teratur dan sesuai dengan SOP, Sudah dilaksanakan tertib administrasi, Kebijakan terkait parkir berada di tangan dinas perhubungan, Komitmen kepala daerah dan jajaran, Prasarana (Gedung parkir) yang sudah tersedia, Sudah idealnya tarif parkir, Penetapan e retribusi pada gedung parkir, Kerjasama dengan instansi lain, faktor Weaknesses (Kelemahan) adalah Kurang maksimalnya pengawasan, Ketidakpastian sistem pengelolaan parkir, Tidak terjadinya penggantian kendaraan hilang, Tidak seimbang target dan realisasi, Tidak dilakukan penetapan setoran minimal tiap titik parkir, Terlalu banyak perpindahan tangan uang setoran, Terbatasnya anggaran, Kurangnya rambu terkait larangan parkir, Kurang tegas sanksi terhadap jukir dan pengawas yang melanggar aturan, Pelayanan perparkiran yang kurang memuaskan, Sistem rekrutmen dan sdm juri parkir masih lemah/kurang, Kurangnya jumlah juru parkir, Kurang memadai jumlah titik parkir, Kurang terjaminnya keamanan jukir resmi. faktor Opportunities (Peluang) adalah Tingkat kunjungan wisatawan dengan menggunakan bus pada hari tertentu mengalami peningkatan yang signifikan, Kemajuan teknologi informasi, Kebijakan Pemerintah daerah yang mendorong pariwisata, Penciptaan rasa aman dan nyaman oleh pemerintah terhadap masyarakat dan Pelayanan publik yang baik. faktor Threats (Ancaman) adalah Kondisi alam (pandemi), Titik parkir yang dikelola masyarakat, Gangguan sosial dan lingkungan, Premanisme dan oknum aparat, Parkir liar dengan tarif tinggi, Petugas parkir resmi menaikkan tarif parkir, Ketidakpatuhan wajib retribusi dalam membayar uang retribusi parkir, Pengawas parkir yang nakal, Penutupan objek wisata, Kebijakan Pemerintah daerah yang menghambat pariwisata.

Wawancara Tahap Kedua

Wawancara tahap Kedua, peneliti menyebarkan kuisioner kepada Expert (Tenaga Ahli) berjumlah 6 orang. Wawancara tahap Kedua kepada Expert (Tenaga Ahli) bertujuan untuk mengetahui Tingkat kepentingan dari berbagai macam faktor - faktor yang mempengaruhi peningkatan Retribusi Parkir dan Tingkat efektifitas respon pemerintah atas faktor tersebut. Hasil wawancara terhadap tingkat kepentingan dan tingkat efektifitas respon pemerintah atas faktor dapat dilihat sebagai berikut :

1. Tingkat Kepentingan

a. Strengths (Kekuatan)

Hasil Tingkat kepentingan faktor - faktor yang mempengaruhi peningkatan retribusi parkir dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Strengths (Kekuatan)		Rerata	TCR
1	Jumlah titik parkir masih memadai	4,67	93,33
2	Prosedur penyetoran retribusi sudah teratur dan sesuai dengan SOP	4,67	93,33
3	Sudah dilaksanakan tertib administrasi	4,17	83,33
4	Kebijakan terkait parkir berada di tangan dinas perhubungan	4,83	96,67
5	Komitmen kepala daerah dan jajaran	4,83	96,67
6	Prasarana (Gedung parkir) yang sudah tersedia.	4,17	83,33
7	Sudah idealnya tarif parkir	4,17	83,33
8	Penetapan e retribusi pada gedung parkir	4,50	90,00
9	Kerjasama dengan instansi lain	4,00	80,00

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa faktor Strengths (Kekuatan) yang memiliki tingkat kepentingan tertinggi dalam meningkatkan retribusi parkir dikota bukittinggi adalah Kebijakan terkait parkir berada di tangan dinas perhubungan dengan skore rata rata 4,83 atau 96,67 dengan kriteria Sangat Penting dan Komitmen kepala daerah dan jajaran dengan skore rata rata 4,83 atau 96,67 dengan kriteria Sangat Penting, sehingga dapat disimpulkan masalah perparkiran dikota bukittinggi merupakan Kebijakan dan komitmen kepala daerah dan jajarannya khususnya dinas perhubungan . Faktor Strengths (Kekuatan) yang memiliki tingkat kepentingan terendah dalam meningkatkan retribusi parkir dikota bukittinggi adalah Kerjasama dengan instansi lain dengan skore rata rata 4,00 atau 80,00 dengan kriteria Penting , hal ini dapat disimpulkan bahwa semua yang berhubungan dengan perparkiran merupakan tugas dan tanggung jawab dari dinas perhubungan sehingga kerjasama dengan pihak lain tidak terlalu penting.

b. Weaknesses (Kelemahan)

Hasil Tingkat kepentingan faktor - faktor yang mempengaruhi peningkatan retribusi parkir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Weaknesses (Kelemahan)		Rerata	TCR
1	Kurang maksimalnya pengawasan	4,50	90,00
2	Ketidakpastian sistim pengelolaan parkir	4,00	80,00
3	Tidak terjadinya penggantian kendaraan hilang	3,83	76,67
4	Tidak seimbangnya target dan realisasi	4,33	86,67
5	Tidak dilakukan penetapan setoran minimal tiap titik parkir	4,00	80,00
6	Terlalu banyak perpindahan tangan uang setoran	3,83	76,67
7	Terbatasnya anggaran	4,33	86,67
8	Kurangnya rambu terkait larangan parkir	4,83	96,67

9	Kurang tegas sanksi terhadap jukir dan pengawas yang melanggar aturan	5,00	100,00
10	Pelayanan perparkiran yang kurang memuaskan	4,17	83,33
11	Sistem rekrutmen dan sdm juri parkir masih lemah/kurang	4,00	80,00
12	Kurangnya jumlah juru parkir	4,17	83,33
13	Kurang memadai jumlah titik parkir	3,67	73,33
14	Kurang terjaminnya keamanan jukir resmi	3,83	76,67

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa faktor Weaknesses (Kelemahan) yang memiliki tingkat kepentingan tertinggi yang harus mendapatkan perhatian dalam meningkatkan retribusi parkir dikota bukittinggi adalah Kurang tegas sanksi terhadap jukir dan pengawas yang melanggar aturan dengan skore rata rata 5,00 atau 100 dengan kriteria Sangat Penting , hal ini dapat disimpulkan bahwa Dinas perhubungan harus lebih tegas dalam menindak juru parkir yang nakal dengan memberikan sanksi yang berat sehingga membuat efek jera karena dengan kurang tegasnya sanksi akan mengakibatkan bertambah kurangnya pendapatan yang bersumber dari perparkiran di kota Bukittinggi. Faktor Weaknesses (Kelemahan) yang memiliki tingkat kepentingan terendah adalah Kurang memadai jumlah titik parkir dengan skore rata rata 3,67 atau 73,33 dengan kriteria Cukup Penting , hal ini dapat disimpulkan bahwa pada saat sekarang ini sudah banyak titik parkir yang dikelola dinas Perhubungan sehingga tidak terlalu penting penambahan jumlah titik parkir.

c. *Opportunities (Peluang)*

Hasil Tingkat kepentingan faktor - faktor yang mempengaruhi peningkatan retribusi parkir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Opportunities (Peluang)		Rerata	TCR
1	Tingkat kunjungan wisatawan dengan menggunakan bus pada hari-hari tertentu mengalami peningkatan yang signifikan	4,67	93,33
2	Kemajuan teknologi informasi	4,83	96,67
3	Kebijakan Pemerintah daerah yang mendorong pariwisata	4,50	90,00
4	Penciptaan rasa aman dan nyaman oleh pemerintah terhadap masyarakat	5,00	100,00
5	Pelayanan publik yang baik	4,67	93,33

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa semua faktor Opportunities (Peluang) memiliki tingkat kepentingan dengan kriteria Sangat Penting , Faktor yang memiliki tingkat kepentingan tertinggi yang harus mendapatkan perhatian dalam meningkatkan retribusi parkir dikota bukittinggi adalah Penciptaan rasa aman dan nyaman oleh pemerintah terhadap masyarakat dengan skore rata rata 5,00 atau 100 dengan kriteria Sangat Penting , hal ini dapat disimpulkan bahwa Dinas perhubungan harus bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang memanfaatkan parkir yang dikelola dinas Perhubungan sehingga dengan rasa aman dan nyaman tersebut masyarakat akan merasa senang dan puas dengan pelayanan fasilitas perparkiran Dinas Perhubungan dan akan selalu memarkirkan kendaraan dilokasi parkir yang sudah ditentukan Dinas Perhubungan.

d. *Threats (Ancaman)*

Hasil Tingkat kepentingan faktor - faktor yang mempengaruhi peningkatan retribusi parkir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Threats (Ancaman)		Rerata	TCR
1	Kondisi alam (pandemi)	4,67	93,33
2	Titik parkir yang dikelola masyarakat.	3,67	73,33
3	Gangguan sosial dan lingkungan	4,33	86,67
4	Premanisme dan oknum aparat	4,83	96,67
5	Parkir liar dengan tarif tinggi	4,33	86,67
6	Petugas parkir resmi menaikkan tarif parkir	4,33	86,67
7	Ketidakpatuhan wajib retribusi dalam membayar uang retribusi parkir	3,83	76,67
8	Pengawas parkir yang nakal	4,50	90,00
9	Penutupan objek wisata	3,67	73,33
10	Kebijakan Pemerintah daerah yang menghambat pariwisata	3,83	76,67

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa faktor Threats (Ancaman), yang memiliki tingkat kepentingan tertinggi yang harus mendapatkan perhatian dalam meningkatkan retribusi parkir dikota bukittinggi adalah Premanisme dan oknum aparat dengan skore rata rata 4,83 atau 96,67 dengan kriteria Sangat Penting, hal ini dapat disimpulkan bahwa Dinas perhubungan dan aparat keamanan harus menindak tindakan premanisme dan oknum aparat nakal yang meresahkan pengguna parkir dikota Bukittinggi sehingga tercipta rasa aman dan nyaman bagi pengguna perparkiran di kota Bukittinggi.

Faktor Threats (Ancaman), yang memiliki tingkat kepentingan terendah adalah Titik parkir yang dikelola masyarakat.dengan skore rata-rata 3,67 atau 73,33 dengan kriteria Cukup Penting hal ini dapat disimpulkan bahwa pada saat ramainya kunjungan wisatawan ke kota Bukittinggi pada waktu tertentu akan mengakibatkan penuhnya lokasi parkir yang dikelola oleh dinas perhubungan sehingga beberapa masyarakat berinisiatif untuk membuka lahan untuk lokasi parkir, hal ini merupakan ancaman tetapi tidak terlalu penting. Dan faktor lain yang memiliki tingkat kepentingan terendah adalah Penutupan objek wisata dengan skore rata rata 3,67 atau 73,33 dengan kriteria Cukup Penting , hal ini tidak terlalu penting dikarenakan objek wisata yang dilakukan penutupan memiliki waktu periodik dan tidak rutin disebabkan oleh beberapa hal seperti penutupan objek wisata pada masa pandemi covid 19 untuk menghindari kerumunan agar pandemi covid 19 bisa dikendalikan.

2. *Tingkat Efektifitas*

a. *Strengths (Kekuatan)*

Hasil Tingkat Efektifitas faktor - faktor yang mempengaruhi peningkatan retribusi parkir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Strengths (Kekuatan)		Rerata	TCR
1	Jumlah titik parkir masih memadai	3,67	73,33

2	Prosedur penyetoran retribusi sudah teratur dan sesuai dengan SOP	3,50	70,00
3	Sudah dilaksanakan tertib administrasi	3,83	76,67
4	Kebijakan terkait parkir berada di tangan dinas perhubungan	3,33	66,67
5	Komitmen kepala daerah dan jajaran	3,67	73,33
6	Prasarana (Gedung parkir) yang sudah tersedia.	3,33	66,67
7	Sudah idealnya tarif parkir	3,33	66,67
8	Penetapan e retribusi pada gedung parkir	3,67	73,33
9	Kerjasama dengan instansi lain	3,83	76,67

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa faktor Strengths (Kekuatan) yang memiliki tingkat efektifitas respon pemerintah terhadap faktor yang mempengaruhi peningkatan perparkiran berada dikriteria Cukup Efektif, faktor Strengths (Kekuatan) yang memiliki tingkat efektifitas tertinggi dalam meningkatkan retribusi parkir dikota bukittinggi adalah Kerjasama dengan instansi lain dengan skore rata rata 3,83 atau 76,67 dengan kriteria Cukup Efektif, sehingga dapat disimpulkan masalah kurang efektifnya kerjasama Dinas Perhubungan dengan pihak lain sehingga masih menimbulkan berbagai permasalahan perparkiran dikota bukittinggi Faktor Strengths (Kekuatan) yang memiliki tingkat efektifitas terendah dalam meningkatkan retribusi parkir dikota Bukittinggi adalah Kebijakan terkait parkir berada di tangan dinas perhubungan, Prasarana (Gedung parkir) yang sudah tersedia.dan Sudah idealnya tarif parkir dengan skore rata rata 3,33 atau 66,67 dengan kriteria Cukup Efektif , hal ini dapat disimpulkan bahwa Kebijakan , sarana dan tarif parkir harus ditinjau ulang karena tidak terlalu efektif dalam meningkatkan retribusi parkir dikota Bukittinggi.

b. Weaknesses (Kelemahan)

Hasil Tingkat Efektifitas faktor - faktor yang mempengaruhi peningkatan retribusi parkir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Weaknesses (Kelemahan)		Rerata	TCR
1	Kurang maksimalnya pengawasan	3,00	60,00
2	Ketidakpastian sistim pengelolaan parkir	3,17	63,33
3	Tidak terjadinya penggantian kendaraan hilang	2,67	53,33
4	Tidak seimbangnya target dan realisasi	2,67	53,33
5	Tidak dilakukan penetapan setoran minimal tiap titik parkir	3,00	60,00
6	Terlalu banyak perpindahan tangan uang setoran	2,50	50,00
7	Terbatasnya anggaran	3,67	73,33
8	Kurangnya rambu terkait larangan parkir	3,33	66,67
9	Kurang tegas sanksi terhadap jukir dan pengawas yang melanggar aturan	4,17	83,33
10	Pelayanan perparkiran yang kurang memuaskan	3,33	66,67

11	Sistem rekrutmen dan sdm juri parkir masih lemah/kurang	2,83	56,67
12	Kurangnya jumlah juru parkir	3,33	66,67
13	Kurang memadai jumlah titik parkir	3,50	70,00
14	Kurang terjaminnya keamanan jukir resmi	3,50	70,00

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa faktor Weaknesses (Kelemahan) yang memiliki tingkat efektifitas respon pemerintah terhadap faktor mempengaruhi peningkatan perparkiran yang tertinggi adalah Kurang tegas sanksi terhadap jukir dan pengawas yang melanggar aturan dengan skore rata rata 4,17 atau 83,33 dengan kriteria Efektif, hal ini dapat disimpulkan bahwa Dinas perhubungan sudah memberikan sanksi dan menindak juru parkir yang nakal tetapi kurang tegas. Berdasarkan data tabel 4.8 diketahui bahwa terdapat Faktor Weaknesses (Kelemahan) yang memiliki tingkat efektifitas respon pemerintah terhadap faktor yang mempengaruhi peningkatan perparkiran dengan kriteria Tidak efektif antara lain Tidak terjadinya penggantian kendaraan hilang, Tidak seimbang target dan realisasi dan Terlalu banyak perpindahan tangan uang setoran , faktor yang terendah adalah Terlalu banyak perpindahan tangan uang setoran dengan skore rata rata 2,50 atau 50,00 dengan kriteria Tidak Efektif.

c. Opportunities (Peluang)

Hasil Tingkat Efektifitas faktor - faktor yang mempengaruhi peningkatan retribusi parkir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Opportunities (Peluang)		Rerata	TCR
1	Tingkat kunjungan wisatawan dengan menggunakan bus pada hari-hari tertentu mengalami peningkatan yang signifikan	3,67	73,33
2	Kemajuan teknologi informasi	4,17	83,33
3	Kebijakan Pemerintah daerah yang mendorong pariwisata	4,00	80,00
4	Penciptaan rasa aman dan nyaman oleh pemerintah terhadap masyarakat	3,83	76,67
5	Pelayanan publik yang baik	3,67	73,33

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui faktor Opportunities (Peluang) yang memiliki tingkat Efektifitas respon pemerintah terhadap faktor yang mempengaruhi peningkatan retribusi parkir tertinggi adalah Kemajuan teknologi informasi dengan skore rata rata 4,17 atau 83,33 dengan kriteria Efektif, dan yang terendah adalah Tingkat kunjungan wisatawan dengan menggunakan bus pada hari hari tertentu mengalami peningkatan yang signifikan dan Pelayanan publik yang baik dengan skore rata rata 3,67 atau 73,33 dengan kriteria Cukup Efektif.

d. Threats (Ancaman)

Hasil Tingkat Efektifitas faktor - faktor yang mempengaruhi peningkatan retribusi parkir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Threats (Ancaman)		Rerata	TCR
1	Kondisi alam (pandemi)	4,17	83,33
2	Titik parkir yang dikelola masyarakat.	2,67	53,33

3	Gangguan sosial dan lingkungan	2,67	53,33
4	Premanisme dan oknum aparat	3,00	60,00
5	Parkir liar dengan tarif tinggi	2,50	50,00
6	Petugas parkir resmi menaikkan tarif parkir	3,00	60,00
7	Ketidakpatuhan wajib retribusi dalam membayar uang retribusi parkir	2,83	56,67
8	Pengawas parkir yang nakal	3,00	60,00
9	Penutupan objek wisata	2,33	46,67
10	Kebijakan Pemerintah daerah yang menghambat pariwisata	2,83	56,67

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa faktor Threats (Ancaman), yang memiliki tingkat Efektifitas respon pemerintah terhadap faktor yang mempengaruhi peningkatan retribusi parkir tertinggi adalah Kondisi alam (pandemi) dengan skore rata-rata 4,17 atau 83,33 dengan kriteria Efektif, hal ini dapat disimpulkan bahwa Tingkat efektifitas respon pemerintah sudah efektif dalam menghadapi Kondisi alam (Pandemi) dengan berbagai macam kebijakan yang diambil dalam mengantisipasi Pandemi.

Pada Faktor Threats (Ancaman) masih banyak terdapat tingkat efektifitas respon pemerintah yang tidak efektif antara lain Titik parkir yang dikelola masyarakat, Gangguan sosial dan lingkungan, Parkir liar dengan tarif tinggi dan Penutupan objek wisata. Faktor Threats (Ancaman) yang memiliki tingkat efektifitas terendah adalah Penutupan objek wisata dengan skore rata-rata 2,33 atau 46,67 dengan kriteria Tidak Efektif.

Analisis SWOT

1. Strategi SO

- a. Menambah Jumlah Titik Parkir untuk mengantisipasi kunjungan wisatawan yang meningkat (S1, O1)
- b. Membuat SOP dan Administrasi yang jelas oleh Dinas Perhubungan sebagai suatu kebijakan untuk memberikan pelayanan perparkiran yang baik kepada masyarakat serta menunjang pariwisata kota Bukittinggi (S2,S3,S4,O3,O5)
- c. Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang tersedia untuk menciptakan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat (S6,O4)
- d. Pemanfaatan Teknologi informasi untuk menetapkan retribusi parkir yang jelas terhadap tarif parkir (S7,S8,O2)
- e. Menjalin Kerjasama dengan Pihak Lain guna terciptanya ketertiban, kenyamanan dan keamanan masyarakat yang memarkir kendaraan (S9,O4)

2. Strategi ST

- a. Kebijakan Dinas Perhubungan dan komitmen pemerintah daerah untuk menertibkan Parkir Liar yang dikelola masyarakat dengan penyamaan tarif parkir dan selalu melakukan pengawasan bagi parkir yang nakal (S4,S5,T2,T5,T6,T8)
- b. Bekerjasama dengan aparat keamanan dan pihak terkait untuk menindak premanisme, oknum aparat dan gangguan sosial lingkungan (S9,T3,T4)
- c. Komitmen Kepala Daerah dan jajarannya untuk meningkatkan pariwisata dengan tetap mempertimbangkan kondisi alam (Pandemi) (S5,T1,T9)

3. Strategi WO

- a. Memaksimalkan pengawasan dan Memberikan tindakan tegas / sanksi terhadap Juru Parkir, Pengawasanya melanggar aturan guna terciptanya ketertiban dan keamanan Masyarakat (W1,W9,O4)

- b. Meningkatkan Jumlah Anggaran perparkiran untuk melengkapi sarana dan rekrutment juru parkir yang baik dan jumlah memadai sehingga tercipta pelayanan parkir yang baik (W7,W8,O5)
- 4. Strategi WT
 - a. Menetapkan setoran minimal retribusi parkir dan pengawasan di setiap titik parkir sehingga akan seimbang antara target dan realisasi retribusi parkir Dinas Perhubungan.(W4,W5,T8)
 - b. Menjamin Keamanan juru parkir resmi dari tindakan premanisme dan oknum aparat yang nakal (W14,T4).

5. PENUTUP

- a. Faktor yang mempengaruhi peningkatan Retribusi Parkir, dilihat dari Strengths (Kekuatan) adalah Jumlah titik parkir masih memadai, Prosedur penyetoran retribusi sudah teratur dan sesuai dengan SOP. Sudah dilaksanakan tertib administrasi, Kebijakan terkait parkir berada di tangan dinas perhubungan, Komitmen kepala daerah dan jajaran, Prasarana (Gedung parkir) yang sudah tersedia, Sudah idealnya tarif parkir, Penetapan retribusi pada gedung parkir, Kerjasama dengan instansi lain, Berdasarkan tingkat kepentingan tertinggi dalam meningkatkan retribusi parkir di kota Bukittinggi adalah Kebijakan terkait parkir berada di tangan dinas perhubungan dengan skor rata-rata 4,83 atau 96,67 dengan kriteria Sangat Penting dan Komitmen kepala daerah dan jajaran dengan skor rata-rata 4,83 atau 96,67 dengan kriteria Sangat Penting. Berdasarkan tingkat efektivitas respon pemerintah terhadap faktor yang mempengaruhi peningkatan perparkiran, faktor Strengths (Kekuatan) yang memiliki tingkat efektivitas tertinggi dalam meningkatkan retribusi parkir di kota Bukittinggi adalah Kerjasama dengan instansi lain dengan skor rata-rata 3,83 atau 76,67 dengan kriteria Cukup Efektif,
- b. Beberapa faktor faktor yang mempengaruhi peningkatan Retribusi Parkir, dilihat dari Weaknesses (Kelemahan) adalah Kurang maksimalnya pengawasan, Ketidakpastian sistem pengelolaan parkir, Tidak terjadinya penggantian kendaraan hilang, Tidak seimbangnya target dan realisasi, Tidak dilakukan penetapan setoran minimal tiap titik parkir, Terlalu banyak perpindahan tangan uang setoran, Terbatasnya anggaran, Kurangnya rambu terkait larangan parkir. Kurang tegas sanksi terhadap jukir dan pengawas yang melanggar aturan, Pelayanan perparkiran yang kurang memuaskan, Sistem rekrutmen dan juru parkir masih lemah/kurang, Kurangnya jumlah juru parkir, Kurang memadai jumlah titik parkir, Kurang terjaminnya keamanan jukir resmi. Berdasarkan tingkat kepentingan tertinggi yang harus mendapatkan perhatian dalam meningkatkan retribusi parkir di kota Bukittinggi adalah Kurang tegas sanksi terhadap jukir dan pengawas yang melanggar aturan dengan skor rata-rata 5,00 atau 100 dengan kriteria Sangat Penting. Berdasarkan tingkat efektivitas respon pemerintah terhadap faktor yang mempengaruhi peningkatan perparkiran, faktor Weaknesses (Kelemahan) yang memiliki tingkat efektivitas tertinggi yang harus mendapatkan perhatian dalam meningkatkan retribusi parkir di kota Bukittinggi adalah Kurang tegas sanksi terhadap jukir dan pengawas yang melanggar aturan dengan skor rata-rata 4,17 atau 83,33 dengan kriteria Efektif.
- c. Beberapa faktor faktor yang mempengaruhi peningkatan Retribusi Parkir, dilihat dari Opportunities (Peluang) adalah Tingkat kunjungan wisatawan dengan menggunakan bus pada hari-hari tertentu mengalami peningkatan yang signifikan, Kemajuan teknologi informasi, Kebijakan Pemerintah daerah yang mendorong pariwisata, Penciptaan rasa aman dan nyaman oleh pemerintah terhadap masyarakat

dan Pelayanan publik yang baik. Berdasarkan tingkat kepentingan tertinggi dalam meningkatkan retribusi parkir dikota bukittinggi adalah Penciptaan rasa aman dan nyaman oleh pemerintah terhadap masyarakat dengan skore rata rata 5,00 atau 100 dengan kriteria Sangat Penting. Berdasarkan tingkat efektifitas respon pemerintah terhadap faktor yang mempengaruhi peningkatan perparkiran, faktor Opportunities (Peluang) yang memiliki tingkat efektifitas tertinggi yang harus mendapatkan perhatian dalam meningkatkan retribusi parkir dikota bukittinggi adalah Kemajuan teknologi informasi dengan skore rata rata 4,17 atau 83,33 dengan kriteria Efektif

- d. Beberapa faktor faktor yang mempengaruhi peningkatan Retribusi Parkir, dilihat dari Threats (Ancaman) adalah Kondisi alam (pandemi), Titik parkir yang dikelola masyarakat, Gangguan sosial dan lingkungan, Premanisme dan oknum aparat, Parkir liar dengan tarif tinggi, Petugas parkir resmi menaikkan tarif parkir, Ketidakpatuhan wajib retribusi dalam membayar uang retribusi parkir, Pengawas parkir yang nakal, Penutupan objek wisata, Kebijakan Pemerintah daerah yang menghambat pariwisata. Berdasarkan tingkat kepentingan tertinggi dalam meningkatkan retribusi parkir dikota bukittinggi adalah Premanisme dan oknum aparat dengan skore rata rata 4,83 atau 96,67 dengan kriteria Sangat Penting. Berdasarkan tingkat efektifitas respon pemerintah terhadap faktor yang mempengaruhi peningkatan perparkiran, faktor Threats (Ancaman) yang memiliki tingkat efektifitas tertinggi yang harus mendapatkan perhatian dalam meningkatkan retribusi parkir dikota bukittinggi adalah Kondisi alam (pandemi) dengan skore rata rata 4,17 atau 83,33 dengan kriteria Efektif

6. DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, S. N. (2021). *Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Medan*.
- Ariyanti, E. R. N. (2019). AKIBAT HUKUM PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN DENGAN PAJAK KELUARAN DALAM MASA PAJAK YANG TIDAK SAMA. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1).
- Asnah, A, Eka, F, Sabri, S, Nasfi, N. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 - 2020. *JUSIE (Jurnal Sosial Dan Ilmu Ekonomi)*, 6(2), 67–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.36665/jusie.v6i02>
- Astuti, T. M. H. P. D. W. (2022). *MANAJEMEN STRATEGIK (sebuah kajian dalam Pendidikan Islam)*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Endri, F., Nengsih, Y. F., & Sabri, Nasfi, N. (2021). Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economics)*, 2(02), 28–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.12345/elkahfi.v2i02.61>
- Hendrayani, E., & Triyasa, A. (2021). *PENGANTAR MANAJEMEN Teori dan Aplikasi*. Insan Cendekia Mandiri.
- Hikmatullah, I. (2021). *Pengaruh Pendampingan, Kompetensi, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Pengembangan Usaha Mikro (Studi di Bank Wakaf Mikro Pesantren Annawawi Tanara)*. UIN SMH BANTEN.

- Larasati, A. C. P., & Meirinawati, M. (2020). Manajemen Strategi Sentra Kreatif dan Teknologi Melalui Inovasi CAK eMUS dalam KORIDOR Coworking Space Pemerintah Kota Surabaya. *Publika*, 8(5).
- Liswatin, L. (2022). Inovasi Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Konawe. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 83–96.
- Lutfi, A., & Prawira, A. (2020). Pembangunan Drainase Berakibat Kepada Hak Pengguna, Problem Pengguna Jalan Dan Perkembangan Ekonomi (Studi Kasus Di Kota Bukittinggi). *El-Kahfi/ Journal of Islamic Economics*, 1(01), 15–21.
- Muslimin, E. (2018). *Implementasi manajemen strategi berbasis finger print dalam meningkatkan kedisiplinan guru: Penelitian di MAN 1 kota Bandung*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Nasfi, N., Asnah, A., Febrianti, E., & Sabri, S. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006-2020. *JUSIE (Jurnal Sosial Dan Ilmu Ekonomi)*, 6(02), 67–79.
- Nasfi, N., Ganika, G., & Dkk. (2022). *Dasar Manajemen Dan Bisnis (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)*.
- Nurhayati, N. (2015). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Cano Ekonomos*, 4(1), 55–66.
- Pricilla, M. E. (2020). *Implementasi Perencanaan Strategis Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan (Studi Kasus Di MAN 2 Ponorogo)*. IAIN Ponorogo.
- Sabri, S., & Nasfi, N. (2020). Dampak Membuang Sampah Sembarangan terhadap Kelestarian Lingkungan dan Ekonomi Beserta Sanksi terhadap Masyarakat yang Membuang Sampah Sembarangan Tempat (Studi Kota Bukittinggi). *JUSIE (Jurnal Sosial Dan Ilmu Ekonomi)*, 5(01), 136–143. <https://doi.org/https://doi.org/10.36665/jusie.v5i01>
- Shavab, F. A., Nasfi, N., Purboyo, P., Karyanto, B., Hikmah, H., Kartika, R. D., Rini, N. K., Arifudin, O., Awaludin, D. T., & Ardiansyah, T. (2021). *Dasar Manajemen & Kewirausahaan (Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktis)*.
- Winarso, W. (2020). *Pengantar Manajemen*.